

EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SERANG

Roshinata Alya Tsuroyya¹, Ani Oktaviani², Dinda Ainurrohmah³, Riswanda⁴

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang

e-mail: tsuroyyaalya4@gmail.com, anioktavv18@gmail.com, dindaanrhmh@gmail.com,
riswanda@untirta.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan sampah di Kota Serang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas masyarakat, sementara implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut menggunakan pendekatan Input, Process, Output, dan Outcome (IPO-O). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat, observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek input masih terdapat keterbatasan armada, ketersediaan TPS yang belum merata (106 titik), serta keterbatasan sumber daya manusia. Pada aspek process, program sosialisasi dan monitoring telah berjalan, namun partisipasi masyarakat masih belum konsisten. Pada aspek output, telah terbentuk 128 bank sampah, tetapi belum sebanding dengan target dan volume timbulan sampah yang melebihi 600 ton per hari. Pada aspek outcome, perubahan perilaku masyarakat belum signifikan, ditandai masih adanya sampah liar dan rendahnya kepatuhan pembayaran retribusi. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan sumber daya, koordinasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat agar kebijakan pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Evaluasi Kebijakan, IPO-O, Kota Serang.

ABSTRACT

Waste management in Serang City continues to face serious challenges due to increasing population growth and community activities, while the implementation of Local Regulation No. 7 of 2021 on Waste Management remains suboptimal. This study aims to evaluate the implementation of the policy using the Input, Process, Output, and Outcome (IPO-O) framework. A qualitative descriptive case study approach was employed. Data were collected through interviews with the Environmental Agency and community members, field observations, and document analysis. The findings indicate that in the input aspect, limitations remain in waste collection vehicles, uneven distribution of temporary disposal sites (106 TPS units), and human resources. In the process aspect, socialization programs and monitoring mechanisms have been implemented, yet community participation remains inconsistent. In terms of output, 128 waste banks have been established, but this number is still insufficient compared to the target and daily waste generation exceeding 600 tons. Regarding outcome, behavioral change among residents has not been significant, as indicated by illegal dumping and low retribution payment compliance. These findings highlight the need to strengthen resources, coordination, and public participation to achieve more effective and sustainable waste management policy implementation.

Keywords: Policy Implementation, Waste Management, Policy Evaluation, IPO-O, Serang City.

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah di Indonesia masih sangat serius. Semakin banyak penduduk dan aktivitas ekonomi, semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Menurut data dari Sistem Informasi

Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2024, Indonesia menghasilkan sekitar 33,98 juta ton sampah per tahun. Sebagian besar sampah ini, yaitu sekitar 60%, berasal dari rumah tangga dan makanan. Sayangnya, hanya sekitar 59,83% dari total sampah tersebut yang dapat dikelola dengan baik. Sisanya masih mencemari lingkungan kita. Masalah ini juga terjadi di Provinsi Banten. Banten menghasilkan sekitar 8.126 ton sampah per hari. Namun hanya sekitar 13,4% atau 1.092 ton yang dapat dikelola dengan baik. Sisanya masih disimpan di tempat pembuangan akhir dengan cara yang tidak tepat, dibakar secara terbuka, atau dibuang langsung ke lingkungan. Kondisi ini sangat memprihatinkan. Kita harus memiliki kebijakan daerah yang efektif untuk mengatur sistem pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan. Masalah pengelolaan sampah juga terjadi di tingkat kabupaten/kota, termasuk di Kota Serang. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas masyarakat meningkatkan volume sampah setiap tahun. Berikut adalah data timbunan sampah Kota Serang tahun 2021–2024:

Tabel 1.1 Data Timbunan Sampah di Kota Serang 2024 - 2025

Tahun	Timbunan Sampah Kota Serang (2021-2024)	
	Harian (Ton)	Tahunan (Ton)
2021	574,44	209.672
2022	584,83	213.464,02
2023	601,38	219.503,03
2024	617,31	225.318,46

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 1.1 data sampah Kota Serang tahun 2021-2024, kita bisa melihat bahwa jumlah sampah semakin meningkat setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas dan pola konsumsi masyarakat yang meningkat juga mendorong bertambahnya volume sampah yang harus ditangani oleh pemerintah daerah. Jika kondisi ini tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang baik, peningkatan sampah berpotensi menimbulkan berbagai masalah lingkungan seperti polusi, menurunnya kualitas kesehatan masyarakat, serta meningkatnya beban pada tempat terjadinya akhir sampah.

Masalah pengelolaan sampah merupakan salah satu isu yang cukup kompleks, mulai dari tingkat nasional sampai lokal. Tingginya jumlah sampah nasional yang belum terurus dengan baik, kondisi di Provinsi Banten yang masih terbatas, serta peningkatan volume sampah di Kota Serang menunjukkan berkurangnya antara jumlah sampah yang dihasilkan dan kapasitas pengelolaannya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah belum optimal dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan serta kesehatan. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah menjadi penting sebagai instrumen pengaturan. Perlu dilakukan evaluasi untuk menilai pencapaian tujuan kebijakan serta mengidentifikasi kendala dalam implementasinya.

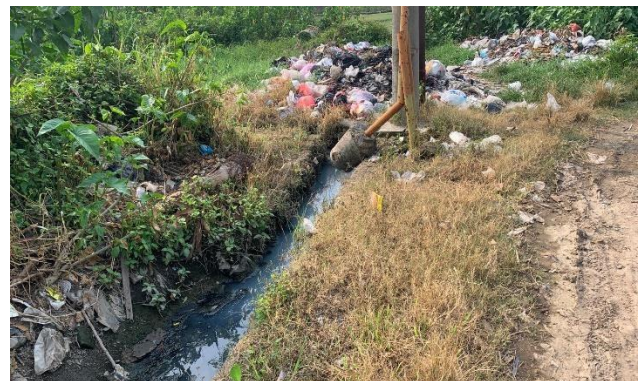
Sebagai Upaya untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut, Pemerintah Kota Serang membuat Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini bertujuan mewujudkan pengelolaan sampah yang sistematis dan berkelanjutan. Cara yang digunakan adalah dengan mengurangi sampah melalui tindakan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah. Selain itu, penanganan sampah juga dilakukan dengan memilah, mengumpulkan, mengangkut, mengolah, dan memproses sampah secara baik. Peraturan ini juga

mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menekankan pentingnya mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah. (KLHK, 2022). Sasaran dari peraturan ini adalah masyarakat, pelaku usaha, dan institusi pemerintah di Kota Serang. Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang bertanggung jawab sebagai pelaksana utama. Peraturan ini telah berlaku sejak tahun 2021 dan masih berjalan hingga sekarang untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Serang.

Meskipun Kota Serang telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengelola sampah, namun pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Serang belum berjalan dengan baik, karena masih banyak sampah yang berserakan di pinggir jalan. Sistem pengelolaan sampah yang diterapkan oleh pemerintah daerah juga belum efektif. Selain itu, ada penelitian lain yang menyatakan bahwa penanganan sampah di Kota Serang belum maksimal karena keterbatasan anggaran, pengawasan yang lemah terhadap sampah liar, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang cara mengelola sampah dengan benar. Kota Serang memang masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan pengelolaan sampah di daerahnya.

Evaluasi kebijakan menjadi penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui evaluasi, pemerintah dapat mengidentifikasi berbagai hambatan dalam implementasi kebijakan, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Selain itu, evaluasi juga dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan langkah perbaikan kebijakan agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian mengenai evaluasi implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 menjadi relevan untuk melihat kondisi nyata pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Gambar 1.1 Tumpukan sampah liar di Jalan Kota Serang



Sumber: Oleh Peneliti, 2026

Berdasarkan gambar 1.1, terlihat menumpuk sampah liar di pinggir jalan yang tidak berada di lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) resmi. Sampah yang terlihat didominasi oleh sampah rumah tangga seperti plastik, sisa makanan, dan limbah kemasan. Hal ini menunjukkan rendahnya praktik pemilahan sampah dari sumbernya.

Kondisi ini mencerminkan masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Sampah di pinggir jalan juga mengindikasikan belum optimalnya sistem pengangkutan sampah oleh pemerintah daerah. Keterbatasan sarana dan prasarana serta lemahnya pengawasan menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di daerah. Penumpukan sampah tersebut berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif seperti pencemaran tanah dan udara, munculnya bau tidak sedap, serta menjadi sumber penyakit bagi masyarakat sekitar. Kondisi ini juga dapat mengganggu estetika lingkungan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, kendala implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana operasional. Jumlah armada pengangkut sampah belum sepenuhnya sebanding dengan cakupan wilayah pelayanan yang meliputi 67 kelurahan. Selain itu, sebagian armada yang digunakan merupakan kendaraan lama sehingga memengaruhi efektivitas pengangkutan. Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) juga masih terkendala keterbatasan lahan serta adanya penolakan dari masyarakat di beberapa wilayah.

Permasalahan tersebut juga terlihat di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) seperti di TPAS Cilowong yang mengalami penumpukan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, kebijakan evaluasi menjadi penting untuk dilakukan guna mengidentifikasi faktor penghambat serta menentukan langkah perbaikan yang tepat. Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah dapat dievaluasi melalui pendekatan Input, Proses, Output, dan Outcome (IPO-O). Dari aspek input, kebijakan ini telah memiliki dasar regulasi yang jelas. Namun dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan pada sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Pada tahap proses, kebijakan pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala seperti belum meratanya sosialisasi kepada masyarakat dan lemahnya koordinasi antar pihak terkait. Hal ini berdampak pada output yang dihasilkan, dimana capaian program pengelolaan sampah belum sepenuhnya sesuai dengan target yang ditetapkan.

Sementara itu, pada tahap outcome, perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah masih belum signifikan. Kondisi ini menunjukkan adanya hambatan utama pada aspek proses dan input. Oleh karena itu, keputusan yang paling rasional adalah kebijakan ini tetap dilanjutkan dengan perbaikan pada aspek implementasi. Perbaikan tersebut meliputi peningkatan sumber daya, penguatan koordinasi, serta optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini berfokus penerapan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah. Permasalahan yang dikaji berfokus pada bagaimana kebijakan ini dijalankan di lapangan, tantangan yang dihadapi selama pelaksanaannya, dan respon serta partisipasi

terhadap masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Untuk melakukan evaluasi yang komprehensif, penelitian ini menggunakan model IPO-O yang meliputi input, proses, output, dan outcome. Dengan pendekatan ini, evaluasi dapat dilakukan mulai dari kesiapan sumber daya, proses pelaksanaan kebijakan, hasil yang dicapai, hingga dampaknya. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan studi kasus deskriptif. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam kondisi nyata penerapan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Serang.

Sasaran dalam penelitian ini mencakup aparaturnya pemerintah sebagai implementor kebijakan, terutama Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, dan masyarakat Kota Serang yang merasakan dampak kebijakan pengelolaan sampah. Adapun fokus analisis dalam penelitian ini adalah terkait bagaimana kebijakan pengelolaan sampah dijalankan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021. Penelitian ini sendiri dilakukan pada tahun 2025 sampai 2026 dan membahas beberapa hal, seperti bagaimana kebijakan dilaksanakan, apa saja kendala yang menghadang saat mengimplementasikan kebijakan, dan seberapa besar masyarakat Kota Serang terlibat dalam pengelolaan sampah.

Pengumpulan data diperoleh melalui data sekunder dan data lapangan. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti Peraturan Daerah, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, kami juga menggunakan dokumen perencanaan dan data statistik terkait pengelolaan sampah. Adapun data lapangan diperoleh melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan kepada masyarakat Kota Serang yang pernah menggunakan layanan pengelolaan sampah untuk menggali informasi mengenai pengalaman, tanggapan, dan penilaian mereka terhadap pelaksanaan kebijakan. Selain itu, observasi dilakukan secara langsung untuk mengamati kondisi sarana dan prasarana, kegiatan pengelolaan sampah, serta perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah di lingkungan sekitar.

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mengacu pada model evaluasi IPO-O. Pada tahap input, analisis dilakukan terhadap regulasi, sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana. Tahap proses menganalisis pelaksanaan kebijakan seperti sosialisasi, koordinasi, komunikasi, pemanfaatan fasilitas, dan pengawasan. Tahap output menilai capaian program, hasil kebijakan, ketepatan sasaran, serta monitoring dan evaluasi kebijakan. Tahap outcome menilai dampak kebijakan terhadap perubahan perilaku masyarakat, dampak sosial dan lingkungan, efektivitas kebijakan, serta keberlanjutan program. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi ideal dan kondisi aktual di lapangan untuk mengetahui hambatan implementasi yang paling dominan. Selain itu, penelitian menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari berbagai sumber.

Model evaluasi IPO-O digunakan karena mampu memberikan gambaran menyeluruh terhadap implementasi kebijakan, mulai dari kesiapan sumber daya, proses pelaksanaan, hasil program, hingga dampak yang dirasakan masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya berfokus pada hasil akhir kebijakan, tetapi juga melihat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Serang.

Tabel 2.1 Operasionalisasi Indikator Model IPO-O

TAHAP	DIMENSI	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
-------	---------	-----------	----------------------	-------------

Input	Regulasi	Kejelasan Kebijakan	Kejelasan aturan pengelolaan sampah	Dokumen
	SDM	Ketersediaan SDM	Jumlah dan kompetensi petugas	Dokumen, Wawancara
	Sarana & Prasarana	Ketersediaan Fasilitas	Ketersediaan armada, TPS, dan fasilitas pendukung	Dokumen, Wawancara
Proses	Sosialisasi	Efektivitas Sosialisasi	Intensitas dan pemahaman masyarakat	Wawancara
	Koordinasi	Koordinasi antar aktor	Kerja sama antar instansi	Wawancara
	Fasilitas	Dukungan Operasional	Penggunaan alat dan fasilitas kerja	Wawancara
Output	Capaian Program	Realisasi target	Pelaksanaan dan capaian program	Wawancara
	Produk Kebijakan	Layanan/bukti nyata	Ketersediaan layanan/program kebijakan	Wawancara
	Ketepatan Sasaran	Kesesuaian penerima manfaat	Ketepatan penerima manfaat	Wawancara
	Pengawasan	Monitoring & evaluasi	Pengawasan program/kegiatan	Wawancara
Outcome	Perubahan Perilaku	Perubahan perilaku masyarakat	Kepatuhan dan partisipasi masyarakat	Wawancara
	Efektivitas	Efektivitas kebijakan	Kesesuaian tujuan dan hasil	Wawancara
	Keberlanjutan	Keberlanjutan kebijakan	Konsistensi hasil kebijakan	Wawancara

Berdasarkan tabel operasionalisasi indikator tersebut, penelitian ini menggunakan model IPO-O (Input, Process, Output, dan Outcome) untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Serang secara menyeluruh. Setiap tahapan digunakan untuk melihat keterkaitan antara kesiapan sumber daya, proses pelaksanaan kebijakan, hasil yang dicapai, hingga dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan. Melalui indikator-indikator tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah serta mengidentifikasi berbagai kendala yang mempengaruhi pelaksanaannya di Kota Serang.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Serang belum berjalan optimal jika dianalisis menggunakan pendekatan input, process, output, dan outcome. Pada tahap input, kesiapan sumber daya menjadi faktor yang sangat menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang, jumlah armada pengangkut sampah yang tersedia saat ini belum sepenuhnya mampu melayani seluruh wilayah administrasi yang terdiri dari 67 kelurahan.

Tabel 3.1 Jumlah Armada di Kota Serang

No.	Jenis Armada	Jumlah Armada
1.	Dump Truck	23
2.	Cator	47
3.	Armroll	13
4.	Alat Berat	6

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, diolah peneliti, 2026

Berdasarkan data tersebut, secara kuantitatif tersedia 89 unit armada operasional. Namun demikian, distribusi dan kapasitas angkut masing-masing armada belum sepenuhnya sebanding dengan volume timbunan sampah harian. Selain itu, sebagian armada merupakan kendaraan lama yang memerlukan perawatan intensif dan berpotensi mengalami gangguan operasional. Ketidakseimbangan antara volume sampah dan kapasitas pengangkutan berdampak pada keterlambatan layanan di beberapa wilayah. Selain keterbatasan armada, ketersediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) juga belum merata.

Tabel 3.2 Jumlah TPS di Kota Serang Tiap Kecamatan

No.	Kecamatan	Unit
1.	Serang	38
2.	Cipocok Jaya	34
3.	Walantaka	9
4.	Kasemen	16
5.	Taktakan	6
6.	Curug	3
Jumlah Titik TPS		106

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, diolah peneliti, 2026

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, jumlah titik Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang tersedia saat ini sebanyak 106 titik yang tersebar di enam kecamatan, jumlah tersebut tampak cukup untuk melayani 67 kelurahan. Namun jika dibandingkan dengan luas wilayah, kepadatan penduduk, serta volume timbunan sampah harian yang mencapai lebih dari 600 ton per hari, ketersediaan TPS tersebut belum sepenuhnya menjamin pemerataan layanan. Selain itu, tidak seluruh TPS memiliki kapasitas dan luas yang sama, sehingga daya tampung dan efektivitas operasionalnya berbeda-beda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, pembangunan TPS harus menggunakan lahan berstatus aset pemerintah, sehingga membatasi fleksibilitas dalam penentuan lokasi. Di sisi lain, terdapat resistensi atau penolakan dari sebagian masyarakat terhadap rencana pembangunan TPS di lingkungan mereka karena kekhawatiran terhadap dampak bau dan pencemaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahap input, tidak hanya terdapat kendala teknis berupa keterbatasan sarana dan prasarana, tetapi juga kendala sosial yang turut mempengaruhi kesiapan implementasi kebijakan. Dari aspek sumber daya manusia, jumlah petugas kebersihan juga dinilai belum sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk, sehingga beban

kerja menjadi relatif tinggi. Secara keseluruhan, kondisi input ini mengindikasikan bahwa fondasi awal implementasi kebijakan masih memerlukan penguatan baik dari sisi fasilitas, anggaran, maupun kapasitas kelembagaan.

Pada tahap proses, pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan berbagai program untuk mendukung pengelolaan sampah. Program seperti Jumat Bersih dan Rabu Asri dilaksanakan sebagai upaya membangun budaya kebersihan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, sosialisasi dilakukan ke sekolah-sekolah dan komunitas warga guna memberikan edukasi mengenai pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan monitoring terhadap bank sampah melalui forum komunikasi serta laporan berkala setiap tiga bulan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa secara prosedural proses implementasi telah dirancang dan dijalankan secara sistematis.

Namun demikian, efektivitas proses tersebut belum sepenuhnya merata. Berdasarkan hasil wawancara, partisipasi masyarakat masih bersifat fluktuatif dan belum konsisten di seluruh wilayah. Pola pikir sebagian masyarakat masih berorientasi pada sistem kumpul–angkut–buang tanpa melakukan pemilahan sampah terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa proses sosialisasi dan pembinaan belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, pada tahap proses, kebijakan telah dijalankan sesuai mekanisme, tetapi kualitas implementasinya masih menghadapi tantangan dalam membangun kesadaran kolektif dan kepatuhan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada pelaksanaan program oleh pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan secara berkala memang telah meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan sampah, namun perubahan perilaku membutuhkan proses yang lebih panjang dan konsisten. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih partisipatif melalui kerja sama antara pemerintah, masyarakat, sekolah, dan komunitas lingkungan agar kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dapat meningkat secara berkelanjutan.

Dari sisi output, implementasi kebijakan telah menghasilkan beberapa capaian nyata, terutama dalam pembentukan bank sampah. Berdasarkan hasil wawancara, hingga saat ini telah terbentuk sekitar 128 bank sampah di Kota Serang. Pada aspek pengawasan, monitoring dilakukan melalui grup WhatsApp misalnya Forum Bank Sampah Kecamatan Serang. Melalui grup tersebut, pelaksana kebijakan dapat memantau berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pengelola bank sampah karena setiap kegiatan dilaporkan secara berkala di dalam grup. Sementara itu, evaluasi dilakukan melalui laporan berkala yang disusun setiap tiga bulan untuk menilai pelaksanaan dan perkembangan kegiatan pengelolaan sampah.

Keberadaan bank sampah ini menunjukkan adanya upaya konkret untuk mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan mengurangi timbulan sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Namun demikian, jumlah tersebut masih jauh dari target jangka panjang pemerintah daerah, yaitu minimal satu bank sampah di setiap RW atau sekitar 1000 unit. Perbedaan yang cukup signifikan antara capaian dan target tersebut menunjukkan bahwa output kebijakan masih berada pada tahap awal pengembangan dan belum mencapai skala yang memadai untuk memberikan dampak luas.

Selain itu, meskipun program telah berjalan, volume sampah yang dihasilkan masyarakat masih relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa output kebijakan belum sepenuhnya sebanding dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara upaya yang dilakukan dan hasil yang dicapai. Situasi ini mengindikasikan perlunya penguatan strategi implementasi agar output yang dihasilkan dapat lebih signifikan dalam menekan timbulan sampah.

Selain itu, keberadaan bank sampah sebenarnya memiliki potensi yang cukup besar dalam mendukung pengurangan timbulan sampah rumah tangga. Bank sampah tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengelolaan sampah, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui kegiatan daur ulang. Namun, optimalisasi program bank sampah masih memerlukan dukungan pemerintah berupa pembinaan, pendampingan, serta penguatan fasilitas operasional agar program dapat berkembang secara lebih maksimal di setiap wilayah Kota Serang.

Pada tahap outcome, dampak kebijakan terhadap perubahan perilaku dan perbaikan kondisi lingkungan belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan wawancara, tingkat kesadaran masyarakat dalam memilah sampah masih tergolong rendah. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang belum membayar retribusi pengelolaan sampah secara rutin, sehingga mempengaruhi efektivitas sistem layanan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Ketidakpatuhan terhadap pembayaran retribusi ini berdampak pada keterbatasan pembiayaan operasional pengelolaan sampah. Meskipun telah tersedia 106 titik TPS, fakta bahwa masih ditemukan titik sampah liar di beberapa lokasi menunjukkan bahwa keberadaan TPS belum sepenuhnya efektif dalam mengendalikan perilaku pembuangan sampah masyarakat.

Fenomena pembuangan sampah sembarangan yang masih ditemukan di beberapa titik juga menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat belum terjadi secara menyeluruh. Hal ini mengindikasikan bahwa outcome kebijakan belum sepenuhnya mencapai tujuan akhir berupa terciptanya sistem pengelolaan sampah yang tertib, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, meskipun kebijakan telah diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan, hasil akhirnya masih memerlukan penguatan baik dari sisi peningkatan kesadaran masyarakat, optimalisasi sarana prasarana, maupun konsistensi penegakan aturan. Rendahnya perubahan perilaku masyarakat menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah masih menghadapi tantangan pada aspek kesadaran sosial. Dalam jangka panjang, keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas, tetapi juga oleh terbentuknya budaya disiplin masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, penguatan edukasi lingkungan dan penegakan aturan secara konsisten menjadi langkah penting untuk mendorong terciptanya perubahan perilaku masyarakat yang lebih peduli terhadap pengelolaan sampah.

Secara keseluruhan, analisis berdasarkan pendekatan input, process, output, dan outcome menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Serang telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya efektif. Tantangan utama tidak hanya terletak pada keterbatasan teknis dan sumber daya, tetapi juga pada aspek sosial berupa rendahnya partisipasi dan kepatuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Dalam perspektif evaluasi kebijakan, aspek input menjadi fondasi utama dalam menentukan keberhasilan implementasi program. Ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan dukungan anggaran memiliki pengaruh besar terhadap kualitas pelayanan pengelolaan sampah. Apabila sumber daya yang tersedia belum memadai, maka pelaksanaan kebijakan berpotensi mengalami hambatan di tahap berikutnya. Kondisi tersebut terlihat pada implementasi pengelolaan sampah di Kota Serang yang masih menghadapi keterbatasan armada, TPS, serta tenaga operasional sehingga berdampak pada efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal jika dilihat

dari aspek input, process, output, dan outcome. Pada aspek input, masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana, seperti jumlah armada pengangkut sampah, ketersediaan TPS, serta jumlah petugas kebersihan yang belum sebanding dengan luas wilayah dan volume sampah di Kota Serang. Selain itu, pelaksanaan kebijakan juga menghadapi hambatan sosial berupa penolakan sebagian masyarakat terhadap pembangunan TPS di lingkungan mereka. Pada aspek process, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang telah menjalankan berbagai program, seperti Jumat Bersih, Rabu Asri, sosialisasi kepada masyarakat, serta monitoring bank sampah melalui forum komunikasi dan laporan berkala. Namun, pelaksanaan program tersebut masih belum berjalan maksimal karena kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dan menjaga kebersihan lingkungan masih rendah. Pada aspek output, kebijakan telah menghasilkan beberapa capaian, salah satunya pembentukan sekitar 128 bank sampah di Kota Serang. Meskipun demikian, jumlah tersebut masih jauh dari target pemerintah daerah dan belum mampu mengurangi volume sampah secara signifikan. Sementara itu, pada aspek outcome, perubahan perilaku masyarakat belum terlihat secara menyeluruh, yang ditandai dengan masih adanya masyarakat yang membuang sampah sembarangan serta rendahnya kepatuhan dalam membayar retribusi sampah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh program dan fasilitas yang disediakan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat melalui peningkatan edukasi, penambahan sarana dan prasarana, pengawasan yang lebih optimal, serta penerapan aturan yang lebih konsisten agar pengelolaan sampah di Kota Serang dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Banten Inside (2025) 'Sampah Kota Serang tak terkelola, warga kena getahnya'. Available at: <https://banteninside.co.id> (Accessed: 15 May 2026).
- Chaerul, M., Tanaka, M. and Shekdar, A.V. (2007) 'Municipal solid waste management in Indonesia: Status and strategic actions', *Journal of the Faculty of Environmental Science and Technology, Okayama University*, 12(1), pp. 41–49.
- Detik News (2026) 'Pemkot Serang bakal tambah area TPAS Cilowong 5 hektare tahun ini'. Available at: <https://news.detik.com> (Accessed: 15 May 2026).
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang (2024) *Laporan Pengelolaan Sampah Kota Serang*. Serang: DLH Kota Serang.
- Kardono (2007) 'Integrated solid waste management in Indonesia', *Journal of Applied Sciences in Environmental Sanitation*, 2(3), pp. 629–636.
- Keban, Y.T. (2008) *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2022) *Kebijakan Pengelolaan Sampah Nasional Berbasis 3R*. Jakarta: KLHK.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2025) *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN): Data Timbulan Sampah*. Available at: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan/> (Accessed: 15 May 2026)
- Radar Banten (2024) 'Banten hasilkan ribuan ton sampah setiap hari'. Available at: <https://www.radarbanten.co.id> (Accessed: 15 May 2026).



- Riswanda (2024a) Nalar Kebijakan: Bernalar Kritis dalam Sebuah Dialektika Kebijakan. Serang: CV Sintesia.
- Riswanda (2024b) Menafsirkan Paradigma Penelitian Kebijakan Publik. Serang: CV Sintesia.
- Riswanda (2024) 'Model evaluasi kebijakan berbasis pendekatan input–process output–outcome (IPO-O)', *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(2), pp. 115–126.
- Suwondo (2019) 'Permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia dan strategi penanganannya', *Jurnal Lingkungan dan Kebijakan Publik*, 4(1), pp. 25–34.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strateegi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah